

ANALISIS BIG DATA TERHADAP PEMBENTUKAN NARASI DEMO TIGA PERIODE: STUDI ANALITIK TEKSTUAL PADA MEDIA BERITA TEMPO**Ahmad Rizki Kurniawan, Adhitya Widyadhana Setiawan, Anis Satrio Fadlurrahman, dan Noviasih Natika Putri**

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

ahmadkur1602@gmail.com

Diterima Redaksi: 18-10-23 | Selesai Direvisi: 22-12-23 | Diterbitkan *Online*: 31-12-2023

Abstract

The end of the new order era gave a welcome to the reform era in increasing the flow of democracy, one of which is freedom of the press, which in the context of this study is the news about the formation of the narrative of Jokowi's three-period demonstration. The research was conducted using the textual network analysis method, to see how the tempo media's role in reporting narratives related to the three-period demo. The results of network mapping on narrative analysis in the tempo media provide four main narratives consisting of the extension of the presidential period, the role of students in the formation of the narrative of the government period, the correlation of society to the government, and the correlation of the student executive body to the government.

Keywords: Three Periods, Tekstual Network Analysis, Big Data

Abstrak

Berakhirnya era orde baru, memberikan sambutan bagi era reformasi dalam peningkatan arus demokrasi, salah satunya yakni kebebasan pers dimana pada konteks penelitian ini yaitu pemberitaan tentang pembentukan narasi demo tiga periode pemerintahan Jokowi. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis teks pada media yaitu *textual network analysis*, untuk melihat bagaimana peran media tempo dalam memberitakan narasi terkait demo tiga periode tersebut. Hasil pemetaan jaringan pada analisa narasi di media tempo memberikan empat narasi utama yang terdiri atas perpanjangan periode kepresidenan, peran mahasiswa dalam pembentukan narasi periode pemerintahan, korelasi masyarakat terhadap pemerintah, dan korelasi badan eksekutif mahasiswa terhadap pemerintahan.

Kata Kunci: Tiga Periode, Analisis Jaringan Tekstual, Data Raya

Pendahuluan

Media dan politik memiliki hubungan yang erat sebelum ilmu politik menjadi otonom. Karena interaksi yang berlangsung lama antara media dan politik, para ahli telah menetapkan posisi yang berbeda untuk studi media dan politik. Salah satu fungsi media adalah menciptakan, mengumpulkan, dan menyiarkan informasi agar masyarakat umum mengetahui kepentingan politik dan dapat berpartisipasi dalam politik (Vellayati Hajad, 2016:5). Artinya, media massa, melalui fungsi persuasifnya, dapat membentuk dan mempengaruhi opini publik tentang masalah-masalah politik kontemporer. Akibatnya, masalah politik menjadi salah satu topik

yang menarik perhatian media dan masyarakat umum. Kontestasi politik untuk kursi kepemimpinan, khususnya kontestasi politik untuk jabatan Presiden Republik Indonesia, adalah salah satu masalah politik yang paling banyak dibicarakan publik. Topik ini selalu berhasil menarik perhatian publik dan media. Ketiga masa jabatan presiden merupakan topik politik yang sering diperbincangkan dan diperdebatkan.

Soal tiga periode Jokowi belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media nasional. Meskipun hal ini muncul kembali pada masa kepresidenan Presiden Joko Widodo, wacana serupa pernah dikemukakan sebelumnya pada masa kepresidenan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi masyarakat menolaknya. Hal ini bukannya tanpa alasan, mengingat masa jabatan Presiden adalah tiga tahun, bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, yang mengatur bahwa "Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Wacana terkait dengan masa kepresidenan selama tiga periode banyak mendapat tanggapan di dalam masyarakat, baik tanggapan yang pro maupun yang kontra. Pro Jokowi 3 Periode percaya bahwa jika Jokowi terpilih kembali sebagai presiden dan Prabowo diangkat sebagai wakilnya, maka rakyat Indonesia akan dipersatukan setelah pemilihan presiden 2014 dan 2019. Mengingat perebutan kursi kepresidenan antara Jokowi dan Prabowo telah berlangsung sengit dalam dua pemilihan presiden terakhir. Republik Indonesia Kontra Jokowi 3 Periode beranggapan bahwa menjabat dalam jangka waktu yang terlalu lama akan menimbulkan kekuasaan absolut, yang rentan terhadap penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengingat pengalaman buruk Indonesia tanpa batasan masa jabatan presiden, yaitu pada masa Soeharto.

Wacana terkait periode kepresidenan Jokowi selama tiga periode tentu tidak luput dari perhatian media; Segala bentuk media, khususnya media internet, berlomba-lomba untuk menarik perhatian publik. Berita Jokowi 3 Periode ini memiliki nilai berita berupa prominen, yaitu orang-orang terkemuka. Orang-orang penting dan terkenal selalu membuat berita, tidak hanya dengan kata-kata atau tindakan mereka, tetapi juga dengan nama mereka. Menurut teori jurnalistik, nama menghasilkan berita atau *names make news* (A.S Hari Sumadiria, 2005:80). Kemasyhuran di media "Joko Widodo", "Presiden Republik Indonesia", adalah kunci dalam hal ini. Alhasil, tak butuh waktu lama untuk menarik perhatian orang.

Untuk itu, penulis membuat penelitian ini dengan tujuan untuk melihat bagaimana bentuk jaringan terkait dengan narasi pengguliran isu tiga periode dan pihak yang pro dan kontranya terafiliasi dengan partai atau pihak tertentu. Tujuan dari analisis tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk pemetaan jaringan kata menggunakan metode analisis kata tekstual

dan dinarasikan dari tiap klaster yang terbentuk. Isu mengenai Jokowi 3 Periode tidak menjadi isu biasa namun mendapat tempat dan perhatian khusus di tengah masyarakat. Kemudian timbulah berbagai polemik dan respon dari masyarakat. Peneliti mengangkat isu Jokowi 3 Periode karena paparan di atas menjadi bukti bahwa topik menjadi menarik dan penting untuk dikaji oleh penulis guna didalami serta menjawab permasalahan yang berkaitan seputar itu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok tertentu yang dikaitkan dengan masalah sosial atau kemanusiaan di sekitarnya (Crewell, 2017). Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memberikan pelajaran berupa memahami dan memaknai fenomena yang terjadi di masyarakat. Secara khusus, peneliti melakukan analisis data sekunder mengenai Demo 3 Periode. Metode penelitian kualitatif ini didukung dengan menggunakan pendekatan analisis riset digital melalui teknik TNA (*textual network analysis*). Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa bahasa dan pengetahuan dapat dimodelkan sebagai jaringan kata-kata dan adanya hubungan di antara mereka

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs berita digital Tempo.co. Media Tempo.co dipilih karena merupakan media berita yang terpercaya dan populer, dengan tingkat kepercayaan terbesar kedelapan sebesar 59,86 persen dan tingkat ketidakpercayaan terbesar keempat sebesar 9,8 persen. Peneliti menggunakan kata kunci untuk menemukan pencarian berita yang tepat dan relevan. Kata dalam TNA berkaitan dengan *nodes* (aktor) dan ikatan/jaringan yang mana ikatan/jaringan ini dilihat dari seberapa sering suatu kata muncul bersamaan. Kata dalam pencarian berita yang peneliti masukan yakni “Demo 3 Periode”. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah artikel berita yang berkaitan dengan demo 3 periode dengan waktu penarikan berita pada periode awal April sampai akhir periode April. Berita yang dikumpulkan selama periode ini menjadi 100 artikel berita yang mewakili 7.990 kata berita.

Peneliti menyatukan semua data dalam satu file kemudian mengubah format file menjadi TXT karena semua data masih dalam format PDF. Pengolahan data kemudian dilakukan dengan menggunakan komputer dan alat pengolah data seperti Gephi atau Wordij. Peneliti menggunakan perangkat lunak Gephi untuk melihat hubungan antar jaringan berdasarkan teks yang diproses Gephi. Hasil pengolahan data software Gephi berupa

visualisasi jaringan *cluster*. Hal ini ditafsirkan dan dianalisis sesuai dengan kata-kata yang muncul dari warna masing-masing cluster.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *textual network analysis* (TNA). *Textual network analysis* (TNA) merupakan salah satu metode untuk mengkodekan hubungan antara kata-kata dalam sebuah teks dan membangun jaringan kata-kata yang terhubung (Popping, 2000). Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa bahasa dan pengetahuan dapat dimodelkan sebagai jaringan kata-kata dan hubungan di antara mereka. Analisis TNA didasarkan pada prinsip bahwa kombinasi kata-kata yang muncul bersama memiliki arti yang unik (Segev, 2020). Aktor-aktor dalam jaringan yang dijelaskan dalam makalah ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam teks. Ikatan antar kata adalah kedekatan atau penampilan bersama, baik dalam kalimat, posting, *tweet*, atau item berita yang sama. Temuan diperoleh setelah melakukan serangkaian analisis narasi yang dihimpun berdasarkan berita Tempo.co terkait demo 3 periode Metode analisis dengan menggunakan metode *text network analysis* (TNA) dengan bantuan beberapa perangkat pengolahan data.

Temuan dibersihkan secara manual dan otomatis menggunakan WORDij. Output file oleh WORDij dalam format TXT dan dimasukkan ke Gephi. Setelah meng-*input*, peneliti melihat klaster berkode warna melalui fitur *overview*. Data yang dipetakan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan menurut warna atau klaster untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Dari kesimpulan akan penelitian tersebut akan memberikan gambaran utama dari tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana arah narasi atau berita yang terbentuk pada media berita Tempo dalam memberitakan atau menarasikan terkait demo tiga periode masa kepresidenan pemerintahan Jokowi.

Hasil dan Pembahasan

Awal Mula Pembentukan Narasi Demo Tiga Periode: Periode Presiden

Momentum terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk masa jabatan ketujuh pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998 menyebabkan demonstrasi pada tahun 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie digantikan. Pada saat yang sama, masyarakat menuntut perubahan (amandemen) UUD 1945 menuju konstitusi yang lebih demokratis sebagai salah satu agenda reformasi. Berdasarkan hal tersebut maka amandemen pertama UUD 1945 disahkan pada tanggal 12-21 Oktober 1999. Amandemen Pertama membatasi kekuasaan eksekutif yang dominan pada pasal-pasal yang terkandung dalam UUD 1945. Pada amandemen pertama beberapa pasal yang

disempurnakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21.

Terkait pembatasan masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 7. Masa jabatan Presiden dibatasi menjadi hanya 2 periode, untuk mencegah terulangnya pemerintahan tanpa batas, akhirnya pasal 7 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Setelah terjadinya amandemen Undang-Undang dasar 1945 berubah menjadi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jawaban atas sistem pemerintahan yang otoritarianisme yang dijalankan oleh Presiden dari mulai orde lama. Dimulai dari mengukuhkan Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup, kemudian dilanjutkan pada masa Soeharto yang diberi peluang untuk dipilih kembali oleh MPR berulang kali. Alasan mengapa pada masa pemerintahan Jokowi dapat memenangkan pemilu keduanya sekaligus menandakan keberlangsungan periode keduanya, disebabkan oleh banyak faktor. Pertama karena partai dibalik kesuksesan Jokowi yang memiliki elektabilitas yang kuat seperti akar yang telah menancap dalam. Kemudian *branding* yang ditampilkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden yang merakyat cukup menyentuh hati masyarakat, seperti yang terlihat pada masa kampanyenya beliau melakukan blusukan yang sangat totalitas. Faktor lainnya karena kinerja dari presiden Jokowi itu sendiri yang terlihat dan cukup terealisasi nyata sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk mempercayakan nasib negeri ini kepada beliau lagi.

Sebagai perbandingan terkait presiden dengan masa pemerintahan lebih dari satu periode, kita dapat melihat pada Presiden Putin yang menjabat sebagai presiden periode pertama tahun 2004 sampai 2008. Kemudian beliau menunjuk Perdana Menteri Dmitry Medvedev maju sebagai presiden. Pada masa itu, Rusia memberlakukan UU bahwa pejabat tidak boleh menjabat selama 3 periode berturut-turut. Dan pada masa pemerintahan Dmitry, dia mengajukan “perubahan konstitusional” untuk mengubah jabatan presiden menjadi 6 tahun, dari semula 4 tahun. Dmitry melantik Putin menjadi Perdana Menteri, yang ketika Dmitry turun jabatan, Putin maju menggantikan Dmitry. Dominasi inilah yang membuat Putin lagi-lagi menjadi orang “berkuasa” di Rusia. Pada pemilu 2012, Putin terpilih menjadi Presiden Rusia kedua kalinya, begitu pula di pilpres 2018.

Awal Mula Pembentukan Narasi Demo Tiga Periode: Wacana Penolakan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Wacana penundaan Pemilu tahun 2024 dan presiden 3 periode menuai polemik di tengah masyarakat. Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center mengungkap sebagian besar masyarakat menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode serta penundaan Pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam survei terbaru yang mereka lakukan pada akhir Maret lalu. Menurut Deputy Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Imawan “mayoritas masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode”. Berdasarkan survei yang digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan metode acak bertingkat (*multistage random sampling*), hanya 27,6 persen masyarakat yang setuju dengan wacana tersebut (setuju 24,3 persen, sangat setuju 3,3 persen). Sedangkan 64,4 persen masyarakat menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi (tidak setuju 55,1 persen, sangat tidak setuju 9,3 persen).

Narasi dari Pihak Pro

Alasan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan publik yang menyetujui dari pemilihan suara untuk tiga periode dikarenakan adanya kepuasan masyarakat terhadap hasil kinerja publik. Seorang bernama Muslim dari Provinsi Aceh pun meneriakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional APEDSI Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikannya di depan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Awalnya, Muslim menceritakan soal Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh yang sangat indah dan diakui dunia. Dia mengatakan bahwa setelah Jokowi menjabat, tidak ada lagi masyarakat ditangkap saat bertani di Taman Nasional Gunung Leuser.

"Saya sebagai aktivis tahun 2013 sebelum Pak Jokowi presiden, kami kalau bertani selalu ditangkap. Yang ditanam di Taman Nasional itu ditebang tanamannya. Setelah Pak Jokowi presiden, sudah ada kemudahan bagi petani kita buat kelompok tani hutan konservasi," (Muslim, 2022).

Dia pun meminta agar kantor pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser yang kini di Medan, dapat dipindahkan ke Aceh Utara. Dia pun menyampaikan beberapa aspirasi lain dari masyarakat Aceh kepada Luhut. Salah satunya, soal hutan lindung yang ada di Aceh.

Namun, setelah mengutarakan aspirasi itu, Muslim tiba-tiba melontarkan dukungan Jokowi 3 periode.

Narasi dari Pihak Kontra

Untuk mengantisipasi terjadinya penambahan jabatan periode Jokowi, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut BEM SI melakukan aksi menolak di depan Gedung DPR pada 11 April 2022. Menurut Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusfrizal, massa mahasiswa diestimasikan ada sekitar 1000 orang. Menurut Luthfi, tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi yang sebelumnya diusulkan beberapa tokoh partai politik mengenai penundaan Pemilu 2024 justru melanggar konstitusi. Mahasiswa berharap tuntutan Demo 11 April tersebut dapat diterima oleh elite politik yang mengusulkan wacana tiga periode masa jabatan presiden itu.

Penolakan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, namun juga dari kelompok relawan Joko Widodo saat Pilpres 2014 dan 2019. Relawan Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014 maupun 2019 yang merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), menolak ikut dalam isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 Periode. Ketua Umum Bulaksumur Gas Poll, Teguh Indrayana, yang dulu juga sebagai Ketua Blusukan Jokowi, mengatakan, para relawan yang menjadi anggotanya hingga saat ini menolak isu perpanjangan masa jabatan Jokowi tersebut. "Kami tidak setuju dengan isu Presiden Jokowi 3 periode," kata dia saat dihubungi, Selasa, 5 April 2022.

Dari pihak oposisi yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengemukakan wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini.

"Wacana soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan jabatan presiden tiga periode itu kami nilai sebagai bentuk nyata pemufakatan jahat. Saya ulangi, perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode itu pemufakatan jahat demi melanggengkan kekuasaan." (Agus Harimurti Yudhoyono, 2022).

AHY tidak memungkiri, memang kekuasaan itu menggoda. Namun, ia meminta jangan sampai pelanggaran kekuasaan itu terjadi lagi dengan dalih apapun. AHY khawatir jika kemunduran proses demokrasi berbentuk perpanjangan jabatan ini terus dibiarkan, maka bisa jadi ke depan Indonesia seakan tak masalah mundur lebih jauh.

Analisis Hasil Temuan Interpretasi

Belakangan ini beberapa pihak melakukan usulan terhadap Jokowi untuk memimpin kembali pada tahun 2024 atau 3 periode. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini sejumlah kelompok yang mengaku relawan Jokowi masih mengagungkan untuk mendukung supaya Jokowi kembali memimpin setelah masa jabatan periode kedua ini habis, yaitu pada tahun 2024 mendatang. Padahal, sudah jelas ditetapkan di dalam UUD 1945 bahwa jabatan seorang presiden hanya boleh memimpin paling lama selama dua periode. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merupakan orang yang mulanya mengomentari isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden pada tahun 2021. Kemudian isu ini diusulkan oleh pihak-pihak lainnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan suatu gagasan mengenai penundaan pemilu pada tahun 2024. Tidak lama kemudian Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto juga mengusulkan hal yang sama, yaitu mengenai penundaan Pemilu tahun 2024.

Selain penundaan pemilu didasarkan pada alasan pemulihan ekonomi, Muhaimin (Ketum PKB) juga mengatakan bahwa banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 ditunda. Menurut klaim Muhaimin mengenai analisis *big data*, dari 100 juta subjek akun di media sosial, terdapat 60% di antaranya mendukung untuk melaksanakan penundaan Pemilu tahun 2024 dan 40% persen menolak hal tersebut. Luhut beberapa waktu lalu juga sempat mengatakan bahwa dia memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu tahun 2024 ditunda. Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang terlebih dahulu, serta perbaikan kondisi perekonomian nasional. Luhut mengklaim ia memiliki *big data* yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu tahun 2024 nanti. Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bagian dari koalisi pemerintah menyatakan bahwa mereka menolak wacana penundaan Pemilu. Namun, mereka mendukung usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan alasan klaim bahwa rakyat masih menghendaki dan belum ada tokoh yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo untuk memimpin.

Melalui narasi tersebut, berita yang telah disadur pada media berita Tempo kemudian dilakukan olah analisa menggunakan analisa jaringan tekstual. Berdasarkan analisis jaringan tekstual (TNA) dari narasi terkait demo tiga periode dari masa kepresidenan Jokowi, terlihat bahwa ada empat klaster atau grup utama sebagai yang tertera pada gambar dan keterangan dibawah berikut.

Klaster Hijau: Perpanjangan Periode Kepresidenan

Gambar 2. Klaster Hijau Perpanjangan Periode Kepresidenan



Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan gambar klaster hijau dapat dideskripsikan isu perpanjangan periode jabatan Presiden Jokowi dikarenakan bergulirnya wacana penundaan pemilu menimbulkan berbagai respon penolakan oleh masyarakat. Selain itu, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) secara terang-terangan mendukung ide perpanjangan jabatan presiden Jokowi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya, mengatakan dukungan ini merupakan timbal balik dari lima tuntutan kepala desa yang selama ini dianggap telah dikabulkan oleh Jokowi selaku presiden. Hal ini tentunya akan memberikan keterangan yang cukup mendalam dan bagi Ketua Umum APDESI yaitu Surya Wijaya itu sendiri dalam merepresentasikan hal tersebut.

APDESI bahkan berencana deklarasi serentak mendukung Jokowi 3 periode setelah lebaran. Perihal ini disuarakan oleh APDESI dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022, yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain penundaan pemilu didasarkan pada alasan pemulihan ekonomi, Muhaimin (Ketum PKB) juga mengatakan bahwa banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 ditunda. Menurut klaim Muhaimin mengenai analisis *big data*, dari 100 juta subjek akun di media sosial, terdapat 60% diantaranya mendukung untuk melaksanakan penundaan Pemilu tahun 2024 dan 40% persen menolak hal tersebut.

Klaster Jingga: Korelasi Masyarakat terhadap Pemerintah**Gambar 4. Klaster Jingga Korelasi Masyarakat terhadap Pemerintah**

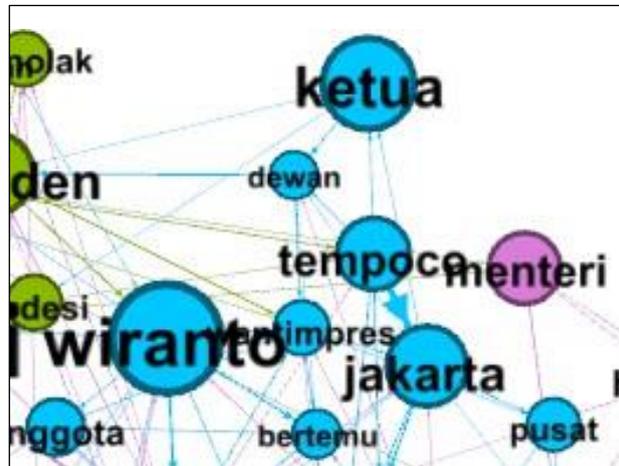
Sumber: Olahan Peneliti

Klaster berwarna orange menunjukkan adanya tuntutan dan desakan dari rakyat kepada pemerintah terkait penundaan Pemilu dan masa jabatan tiga periode Presiden Jokowi. Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufriзал mengatakan dalam unjuk rasa 11 April 2022, mahasiswa memiliki enam tuntutan. Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Ketiga, mahasiswa menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Selain itu, BEM SI mengusung tagar *#RakyatBangkitMelawan* dengan 4 tuntutan baru. Berikut ini tuntutan mereka. *Pertama*, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. *Kedua*, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022. *Ketiga*, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. *Keempat*, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

Klaster Biru: Korelasi Badan Eksekutif Mahasiswa dengan Pejabat Pemerintahan

Gambar 5. Klaster Biru Korelasi Badan Eksekutif Mahasiswa dengan Pejabat Pemerintahan



Sumber: Olahan Peneliti

Informasi yang dapat disampaikan dari hubungan klaster yang ditunjukkan dengan warna biru tersebut terkait dengan pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di kantor Wantimpres, Jakarta Pusat. Pertemuan itu terjadi di tengah demo yang direncanakan oleh mahasiswa pada 11 April. Wiranto memberikan penjelasan atas isu Jokowi 3 periode hingga pemilihan umum 2024 ditunda. Wiranto juga memberitahu mahasiswa bahwa pidato publik bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun soal wacana Jokowi 3 periode, Wiranto mengaku meminta mahasiswa untuk berpikir rasional Pertama terkait peluang terjadinya Jokowi 3 periode lewat amandemen UUD 1945.

Menurut Wiranto, ada banyak sekali syarat untuk mengubah UUD, diantaranya mengumpulkan suara yang setuju. Sementara saat ini, baru 3 partai politik saja yang menyuarakan isu ini. Kedua, Wiranto menyebut sejauh ini tak ada kegiatan apapun di DPR maupun lembaga pemilu yang mengisyaratkan penundaan pemilu. Ketiga, pemerintah masih disibukkan dengan masalah ekonomi nasional dan mitigasi Covid-19. Wiranto mengatakan tidak ada yang melarang mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa. Ia hanya mempersoalkan tujuan demo, padahal Jokowi 3 periode tersebut memang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab oleh presiden. Dari penjelasan tersebut kemudian alasan aparat turun langsung untuk membubarkan demo tersebut juga dikarenakan sudah terjawabnya aksi tuntutan mahasiswa dan tidak perlu dikhawatirkannya lagi terkait isu tentang masa pemerintahan presiden Jokowi tiga periode tersebut.

Penutup

Narasi terkait pemerintahan tiga periode pada masa kepresidenan dari Jokowi memberikan polemik dan perbincangan pada masyarakat. Tujuan penelitian untuk melihat bagaimana bentuk jaringan yang terbentuk pada narasi di media berita Tempo dengan konteks yang sama menghasilkan empat kluster narasi utama. Hasil tersebut didapat setelah diolah melalui metode analisis jaringan teks (TNA) dimana kluster terdiri atas kluster hijau, ungu, jingga, dan biru. Kluster hijau terkait dengan perpanjangan periode kepresidenan, kluster ungu terkait dengan peran mahasiswa dalam pembentukan narasi pemerintahan, kluster jingga terkait dengan korelasi masyarakat terhadap pemerintah, dan kluster terakhir yaitu biru terkait dengan korelasi BEM dengan pejabat pemerintahan.

Pada kluster hijau yang terkait dengan perpanjangan periode kepresidenan didapatkan poin utama bahwa isu perpanjangan periode jabatan Presiden Jokowi dikarenakan bergulirnya wacana penundaan pemilu menimbulkan berbagai respon penolakan oleh masyarakat. Pada kluster ungu yang terkait dengan peran mahasiswa dalam pembentukan narasi pemerintahan didapatkan poin utama bahwa mahasiswa tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI yang kemudian melakukan demonstrasi di Gedung DPR Jakarta sebagai usaha antisipasi fenomena Jokowi 3 periode yang dianggap melanggar konstitusi. Pada kluster jingga terkait dengan korelasi masyarakat terhadap pemerintah didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat menuntut dan mendesak kepada pemerintah terkait penundaan Pemilu dan masa jabatan tiga periode Presiden Jokowi. Dan kesimpulan pada kluster terakhir, yaitu kluster biru yang terkait dengan korelasi BEM dengan pejabat pemerintah didapatkan kesimpulan terkait dengan pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto dengan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, Moh. Khory. Moh. Khory Alfarizi. 2022. "Survei Populi Center, Masyarakat Tolak Ide Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu", <https://nasional.tempo.co/read/1585376/survei-populi-center-masyarakat-tolak-ide-jokowi-3-periode-dan-penundaan-pemilu/full&view=ok>. Diakses pada 22 Mei 2022.
- Amanah, R. (2022). Analisis framing berita Jokowi 3 periode pada Portal Media Online Tempo. co dan CNNIndonesia. com (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

- A.S. Hari Sumadiria. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dewi Nurita. 2022. BEM SI Sebut Ada 50-an Kampus Bakal Ikut Demo 11 April 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1580521/bem-si-sebut-ada-50-an-kampus-bakal-ikut-demo-11-april-2022>, diakses pada 20 Mei 2022
- Faisal Javier. 2021. Tingkat Kepercayaan dan Kepopuleran Media di Indonesia. <https://data.tempo.co/data/1141/tingkat-kepercayaan-dan-kepopuleran-media-di-indonesia>, diakses pada 20 Mei 2022.
- Fatwa, A. M. (2009). *Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*. Penerbit Buku Kompas.
- Fitriyah, R. ANALISIS PESAN DAN PERAN TOKOH POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO MENGENAI ISU JABATAN 3 PERIODE.
- Henry Subiakto, Rachmah Ida. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Najib, A. (2017). *STUDI KOMPARASI PENDAPAT M. QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTB TENTANG HUKUM MEMILIH PRESIDEN NON MUSLIM DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, STAIN Kudus).
- Nugraheny, Dian Erika. 2022. "Munculnya Dukungan Jokowi 3 Periode dari Para Kepala Desa di Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/30/07142241/munculnya-dukungan-jokowi-3-periode-dari-para-kepala-desa-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 22 Mei 2022.
- Pin, P., Siahaan, J. T. H., Nellya, B., & Bangun, M. (2021). PRESIDEN INDONESIA TIGA PERIODE. *Jurnal Darma Agung*, 29(2), 269
- Popping, R. (2000). *Computer-assisted text analysis*. Sage.
- Rachman, Arrijal. 2022. "Relawan Jokowi Alumni UGM Tolak Isu Presiden 3 Periode". <https://nasional.tempo.co/read/1578653/relawan-jokowi-alumni-ugm-tolak-isu-presiden-3-periode/full&view=ok>. Diakses pada 22 Mei 2022.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018)
- Segev, E. (2020). Textual network analysis: Detecting prevailing themes and biases in international news and social media. *Sociology Compass*, 14(4), e12779.

- Suhandang, Kustadi. Pengantar Jurnalistik Organisasi, Produk Dan Kode Etik. (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016)
- Suryawati, Indah. Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktek (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Tempo.Co. 2022. "Demo 11 April: BEM SI Tetap Tuntut Tolak Jokowi 3 Periode". <https://nasional.tempo.co/read/1580903/demo-11-april-bem-si-tetap-tuntut-tolak-jokowi-3-periode/full&view=ok>. Diakses pada 22 Mei 2022.
- Tempo.co. 2022. Demo 11 April: BEM SI Kerahkan 1.000 Mahasiswa, BEM Nusantara Terserah Anggotanya. <https://nasional.tempo.co/read/1580430/demo-11-april-bem-si-kerahkan-1-000-mahasiwa-bem-nusantara-terserah-anggotanya>, diakses pada 20 Mei 2022.
- Vellayati Hajad, "Media dan Politik (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik", Source: Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 2 no 2, Universitas Teuku Umar, 2016
- Wicaksono, Pribadi. 2022. "AHY khawatir jika kemunduran proses demokrasi berbentuk perpanjangan jabatan ini terus dibiarkan, maka bisa jadi ke depan Indonesia seakan tak masalah mundur lebih jauh." <https://nasional.tempo.co/read/1579382/tolak-perpanjangan-jabatan-jokowi-3-periode-ahy-berikutnya-seumur-hidup>. Diakses 22 Mei 2022.